

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBELAJARAN DARING BAGI PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SELAMA COVID-19 DI KECAMATAN LUBUK BASUNG, KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

Oleh : Nisa Ulzakra

Email. nisaulzakra4244@student.unri.ac.id

**Pembimbing : Wazni, S.IP., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.

Telp/Fax. 0761-63277

## *Abstract*

*The COVID-19 pandemic has had an impact on many parties, this condition has penetrated the world of education, the central government down to the regional level has issued a policy to close all educational institutions. This makes the government and related institutions must present an alternative educational process. The policy is in the form of a Circular of the Ministry of Education and Culture No. 4 of 2020 concerning Implementation of Education Policies in the Emergency Period of the Spread of COVID. Governor of West Sumatra Regulation Number 20 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Handling Covid-19 in West Sumatra. Instruction of the Regent of Agam Number: 1528/Disdikbud-Ag/2020 concerning Handling the Impact of the Corona Virus in the Agam Regency Environment. Instruction of the Regent of Agam Number: 421/2445/Disdikbud/2020 concerning Extension of Time for Implementation of Study Activities and Ramadan Worship Activities at Home. Circular Letter of the Agam District Education Office Number: 421/1539/Disdikbud/2020 concerning the Prevention of Covid-19.*

*The purpose of this study is to find out the Implementation of Government Policy in Online Learning for Elementary School Education During Covid-19 in Lubuk Basung District, Agam Regency in 2020. The theory used in this study is the implementation of George Edward III. This research uses a qualitative method with the type of research in the form of descriptive research. Data collection techniques in this study are interviews, observation and documentation.*

*The results of the study explain that the implementation of online policies is still not optimal. Because the four variables that affect the success or failure of policy implementation are not fully implemented properly. And there are also many obstacles faced by the government, schools, parents and students. Therefore, the need for cooperation between policy makers, policy implementers and policy objectives so that they are more implemented.*

**Keywords :** *Online learning communication, Online learning resources, Disposition of online learning, Online learning biraucracy structure*

## PENDAHULUAN

Dari UUD 1945 terlihat jelas bahwa pendidikan adalah hak mutlak rakyat sehingga merupakan kewajiban dan tanggung jawab besar pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat dalam pendidikan ini, dimulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. UUD 1945 pada Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; dan ayat (3) yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Pada tanggal 24 Maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID. Surat Edaran tersebut menjelaskan proses belajar di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai adaptasi menghadapi pandemi Covid-19.

Surat Edaran diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*). Van der Hoeven berpandangan bahwa "*beleidsregel*" merupakan peraturan hukum semu yang tidak memiliki kekuatan hukum yang absah, akan tetapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan hal itu diberlakukan dan dipatuhi sebagaimana layaknya peraturan hukum yang sah. Tujuan utama pembentukan *beleidsregel* ialah untuk memberikan arahan (petunjuk, pedoman) kepada pejabat bawahan agar lancar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Selain itu juga ditujukan mengisi kekosongan

aturan-aturan hukum dalam keadaan yang mendesak dan bersifat darurat, atau setidaknya untuk melengkapi menyempurnakan ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sesuai pula dengan sisi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. (Adlin & Yusri, 2020)

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat batal melakukan proses belajar mengajar (PBM) tatap muka pada awal Agustus 2020. Alasannya, ditemukan ada lima warga di daerah itu positif Covid-19. Surat edaran untuk memperpanjang PBM secara dalam jaringan dan luar jaringan sudah dibuat. Informasi staf telah di sampaikan ke Bupati Agam dan apabila sudah turun maka akan disampaikan ke seluruh PAUD, TK, SD dan SMP di Agam. Namun dengan adanya penambahan lima kasus positif Covid-19 di Agam, maka PBM secara dalam jaringan dan luar jaringan bakal diperpanjang. Perpanjang PBM secara dalam jaringan dan luar jaringan bakal lama setelah Agam dinyatakan zona penyebaran Covid-19. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2020/2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam SKB empat menteri itu, PBM tatap muka boleh dilakukan apabila daerah itu merupakan zona hijau, tidak ada kasus positif Covid-19, tidak ada kasus kematian dan lainnya. Dengan dasar itu, PBM secara daring di perpanjang dan apabila tetap dilakukan tatap muka maka akan melanggar SKB empat menteri tersebut. Proses belajar mengajar secara dalam jaringan telah dimulai saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun saat normal baru PBM dilakukan secara daring dan luar jaringan dalam mencegah penyebaran Covid-19. (Republika, 2020)

Selain itu, sekolah secara online tidak maksimal karena siswa tidak langsung diajar dan diawasi guru. Kalau di rumah, pasti ada orangtua yang bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anak mereka secara penuh. Tidak semua siswa juga punya handphone sehingga menyebabkan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Dan juga rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran daring sehingga mereka malas untuk melakukan pembelajaran.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas terkait permasalahan yang ada mengenai efektivitas kebijakan pemerintah terhadap pembelajaran daring bagi pendidikan sekolah dasar selama covid-19 di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tahun 2020, maka dapat dirumuskan:

“Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pembelajaran daring bagi pendidikan sekolah dasar selama covid-19 di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tahun 2020?”

## TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pembelajaran daring bagi pendidikan sekolah dasar selama covid-19 di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tahun 2020

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Studi Terdahulu

- Wahyu Aji Fatma Dewi, dengan judul Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar
- Hilna Putra, Luthfi Hamdani Maula, Din Azwar Uswatun, dengan judul Analisis Proses Pembelajaran Dalam

Jaringan (DARING) Masa Pandemi COVID-19 pada Guru Sekolah Dasar

- Nureza Fauziah dengan judul Dampak Covid-19 Terhadap Efektivitas Pembelajaran Daring Pendidikan Islam
- Aas Aliana Futriani Hidayah, Robiah Al Adawiyah, Prima Ayu Rizqi Mahanani dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19
- Ika Ismayanti dengan judul Efektivitas Kebijakan Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Smpn 2 Sukamulya Kabupaten Tangerang
- Mega Berliana Yolandasari dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas II A Mi Unggulan Miftahul Huda Tumang Cepogo Boyolali Tahun Pelajaran 2019/2020
- Ifrah Syahmina dengan judul Efektivitas Pembelajaran Biologi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan

## KERANGKA TEORI

### *Implementasi Kebijakan*

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (*George Edward III, 1980:1*), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.

Untuk mengkaji implementasi kebijakan, Edward memulai dengan mengajukan dua pertanyaan dasar, yakni: 1)

faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? 2) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Dari dua pertanyaan tersebut kemudian model implementasi Edward III dirumuskan yang memiliki empat variabel, variabel tersebut yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

## **METODE PENELITIAN**

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Format penelitian ini ialah format deskriptif yang bertujuan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi. Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran sejauh mana Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembelajaran Daring Bagi Pendidikan Sekolah Dasar Selama Covid-19 Di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif dan mencoba menggambarkan secara mendalam objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembelajaran Daring Bagi Pendidikan Sekolah Dasar Selama Covid-19 Di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Tahun 2020.**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut.

Pada awal mula covid-19, kegiatan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Agam dialihkan kerumah masing-masing selama 14 hari guna mengantisipasi penularan *Corona Virus Disease*. Mulai dari tingkat SMA, SMP, SD, TK, hingga Paud. Akan tetapi keadaan yang semakin memburuk menyebabkan kegiatan pembelajaran tatap muka terpaksa diperpanjang. Edward III merumuskan 4 variabel yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel yang dimaksud yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

### **Komunikasi Dalam Kebijakan Pemerintah mengenai Pembelajaran Daring Bagi Pendidikan Sekolah Dasar**

Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses

komunikasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Pertama *transmisi*, menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut.

Hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yang selanjutnya yaitu *kejelasan*, kebijakan yang telah ditransmisikan pada para pihak terkait hendaknya diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut.

Dalam surat edaran terkait pembelajaran daring tersebut disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah adalah memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Kegiatan pembelajaran daring tersebut dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum serta difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19.

#### **Sumber Daya Dalam Kebijakan Pemerintah mengenai Pembelajaran Daring Bagi Pendidikan Sekolah Dasar**

Perintah implementasi mungkin akan diteruskan secara jelas dan konsisten namun jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasipun cenderung kurang efektif.

*Sumber daya manusia*, SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya manusia (Staf) harus cukup dan cakap. Artinya bahwa SDM harus memadai secara jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakap.

Pada pembelajaran daring ini, peran orang tua lah yang paling penting. Karena orang tua lah yang menggantikan peran guru. Yang mana biasanya gurulah yang mendampingi para siswa belajar di sekolah, tetapi karena pembelajaran daring ini orang tua lah yang berperan dalam mendampingi siswa belajar di rumah.

Tidak banyak juga orang tua yang mengeluhkan kebijakan pembelajaran daring tersebut. Karena merasa keteteran yang mana biasanya hanya mendampingi anak mereka dalam pembuatan pekerjaan rumah saja, karena pembelajaran daring ini jadi mendampingi pada waktu pembelajaran juga. Dan tidak semua orang tua memahami pembelajaran walaupun hanya pembelajaran dasar. Hal itu membuat orang tua kesusahan untuk menjelaskan pelajaran kepada anak mereka. Belum lagi dengan orang tua yang bekerja, mereka kesusahan untuk membagi waktu untuk mendampingi anak dan bekerja.

Untuk kebijakan pembelajaran daring yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud, Pemerintah menganggarkan total Rp7,21 triliun untuk subsidi kuota bagi pelajar dan mahasiswa untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring akibat Covid-19.

Karena keadaan yang tidak merata antar sekolah jadi model pembelajaran daring ini pun berbeda beda. Ada yang mengajar secara daring, ada yang menggunakan metode luring. Ada juga yang menggabungkan dua metode tersebut, daring dan luring. Kebijakan ini tergantung dengan keadaan dan kesanggupan masing-masing sekolah.

### **Disposisi Dalam Kebijakan Pemerintah mengenai Pembelajaran Daring Bagi Pendidikan Sekolah Dasar**

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Dalam hal ini setiap guru harus mempunyai komitmen tinggi dalam melaksanakan pembelajaran daring tersebut. Masih banyak guru-guru yang belum menegakkan komitmen akan pelaksanaan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Banyaknya guru yang meninggalkan kewajibannya untuk mendampingi para siswa dalam melaksanakan belajar di rumah, terlebih dimana para guru diperbolehkan untuk berkreasi dalam memberikan pembelajaran kepada para siswanya.

Bagi sekolah yang menggunakan metode luring, pihak guru pun juga merasa

kewalahan pada saat pembelajaran daring karena guru harus menyiapkan materi dan tugas untuk satu minggu yang akan dikerjakan di rumah oleh siswa. Pembelajaran secara daring juga membuat kurang optimalnya penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa, sehingga pembelajaran dirasa kurang bermakna bagi para siswa.

### **Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembelajaran Daring Bagi Pendidikan Sekolah Dasar**

Struktur birokrasi berkaitan erat dengan prosedur, sistem kerja, pembagian tugas, wewenang serta koordinasi antar pelaksana kebijakan. Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang paling sering menjadi pelaksana kebijakan. Menurut Edward ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan bagi setiap implementor. SOP mampu menyeragamkan tindakan-tindakan dari organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

SOP yang baik adalah yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementor. Harapan dengan adanya SOP, sumber daya pelaksana kebijakan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektifitas dan efisiensi kinerja, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks. Begitu pentingnya SOP untuk menjalankan

seluruh pembelajaran jarak jauh agar tidak ada perbedaan antar sekolah karena sudah ada SOP yang menjadi rujukan kepada seluruh penyelenggara pembelajaran jarak jauh. Namun masih terdapat sekolah yang belum memiliki SOP yang baku.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah terkait pembelajaran daring pada sekolah dasar di Lubuk Basung, Kabupaten Agam tidak terlepas dari peran birokrasi seperti halnya Dinas Pendidikan selaku instansi yang bertugas sebagai pihak yang mengatur proses kegiatan belajar mengajar selama Pandemi COVID-19 seperti halnya mengedarkan kebijakan terkait penyesuaian sistem belajar dan kerja pegawai sekolah.

Pada awal covid merebak di Indonesia, Dinas Pendidikan Kabupaten Agam mengarahkan untuk melaksanakan proses pembelajaran dari rumah atau pembelajaran daring, ada beberapa teknis pembelajaran yang diterapkan selama siswa belajar di rumah. Yaitu, bagi sekolah berada di wilayah memiliki internet gurunya merancang pembelajaran secara daring, menggunakan aplikasi yang disediakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi yang dapat digunakan seperti Rumah Belajar, Guggle G Suites for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, Quipper School, Rumah Online Ruang Guru, Sekolahmu, Zenius dan Anggun PAUD. Sedangkan bagi sekolah yang berada di wilayah tidak memiliki jaringan atau siswa tidak memiliki handphone, guru memberikan tugas secara manual. Kemudian tugas yang dikerjakan siswa dikirim kembali ke guru melalui Whatsapp dalam bentuk foto dan diperiksa setiap harinya.

Dengan demikian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam mengatakan bahwa koordinator unit kerja kecamatan, pengawas, penilik, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, pamong belajar dan staf tetap hadir seperti

biasa dengan mengerjakan tugas yang menjadi tanggungjawab. Teknis pembelajaran tersebut diberitahukan ke sekolah-sekolah melalui Surat Edaran Nomor: 421/1539/DISDIKBUD/2020 tentang pencegahan Covid-19.

Untuk awal tahun pembelajaran baru 2020/2021, Dinas Pendidikan kembali mengeluarkan surat edaran Nomor : 421.1/3191/Disdikbud-2020 tentang Petunjuk Teknis Belajar Dari Rumah Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Surat edaran tersebut menindaklanjuti intruksi Bupati Agam Nomor: 421/3175/Disdikbud/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penyelenggaraan Awal Tahun Pelajaran 2020/2021 dimasa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Yang mana pada surat edaran tersebut disebutkan bahwa selama peserta didik belajar dari rumah, guru memberikan materi atau tugas sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya guru memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Dan juga disebutkan tujuan dari pembelajaran jarak jauh tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembelajaran Daring Bagi Pendidikan Sekolah Dasar Selama Covid-19 Di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pemerintah terkait pembelajaran daring bagi sekolah dasar di Lubuk Basung diawali

dengan memberikan surat edaran oleh Dinas Pendidikan kepada Kepala sekolah dimana dalam hal tersebut diwakilkan oleh koordinator unit kerja Kecamatan. Selanjutnya pihak sekolah memberitahukan kepada orang tua atau wali murid perihal surat edaran tersebut melalui komite sekolah dan grup kelas yang telah dibentuk oleh guru kelas masing-masing. Akan tetapi hal tersebut masih menimbulkan kesenjangan informasi bagi orang tua yang tidak memiliki Handphone.

- 2) Sumber daya manusia pada kebijakan terkait pembelajaran daring ini merupakan guru. Guru di sekolah dasar yang ada di Kecamatan Lubuk Basung kurang memadai terlebih di daerah terpencil. Dan kebanyakan guru kurang menguasai teknologi untuk melakukan pembelajaran daring.
- 3) Pemerintah Kabupaten Agam mengadakan pemasangan wifi gratis di tempat tempat umum seperti di daerah perkantoran, dan mesjid-mesjid guna memfasilitasi para siswa yang kesulitan akan jaringan internet atau tidak memiliki kuota bisa menggunakan wifi tersebut dan tetap dapat mengikuti pembelajaran secara daring.
- 4) Tidak semua sekolah di Lubuk Basung melaksanakan pembelajaran daring atau menggunakan media teknologi dikarenakan terkendala oleh banyak murid yang tidak memiliki media teknologi tersebut. Sehingga banyak sekolah yang memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara luring dengan menjemput tugas ke sekolah. Dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten agam tidak mengharuskan pihak sekolah untuk melaksanakan

pembelajaran secara daring bagi sekolah yang dirasa tidak mampu untuk melaksanakan pembelajaran secara daring tersebut.

- 5) Masih banyak kendala dan keluhan terkait pembelajaran daring ini, baik daring pihak sekolah, orang tua, bahkan murid itu sendiri. Pihak guru merasa tidak ada kepuasan batin dalam mengajar para murid, sedangkan orang tua mengeluhkan sulitnya membagi waktu untuk mendampingi anaknya dalam jam pelajaran dan bekerja. Bagi murid itu sendiri pun mengeluhkan merasa bosan dirumah, dan selalu membut tugas.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembelajaran Daring Bagi Pendidikan Sekolah Dasar Selama Covid-19 Di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Tahun 2020:

- 1.) Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Agam diharapkan lebih memperhatikan bagaimana kondisi dan situasi dalam perumusan kebijakan di masa pandemi Covid-19. Dengan begitu pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Lubuk Basung dapat berjalan dengan lancar dan hendaknya lebih gencar lagi memberikan dukungan terhadap peserta didik dan guru dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19.
- 2.) Bagi Sekolah atau Satuan Pendidikan hendaknya lebih memfasilitasi guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran terutama pada pelaksanaan pembelajaran daring.
- 3.) Bagi guru dapat lebih mengembangkan pembelajaran yang dapat membuat kondisi belajar tetap efektif walaupun

dilakukan dalam jaringan, lebih sering berkomunikasi dengan peserta didik. Guru hendaknya lebih meningkatkan kreativitasnya sebagai pendidik untuk menjadi guru yang lebih profesional.

- 4.) Bagi guru dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 di sekolah dasar dan guru diharapkan untuk lebih memperhatikan kebijakan dari pemerintah dalam merancang model pembelajaran. Serta melihat situasi dan kondisi dari setiap siswa.
- 5.) Bagi peserta didik lebih diberikan motivasi dalam belajar agar pada saat pelaksanaan belajar melalui dalam jaringan peserta didik tetap memiliki semangat yang tinggi dan dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gunawan, I. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal

- Adlin, & Yusri, A. (2020). Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid- 19 Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 72-73.
- Dewi, W. A. F. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>
- Fauziyah, N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Efektivitas Pembelajaran Daring Pendidikan Islam. *Al-Mau'izhoh*, 2(2), 1–11.
- Hilna Putria<sup>1</sup>, Luthfi Hamdani Maula<sup>2</sup>, D. A. U. (2020). Analisis Proses Pembelajaran Dalam Jaringan (DARING) Masa Pandemi COVID-19 pada Guru Sekolah Dasar. *JURNAL BASICEDU*, 4(4), 861–872. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.460>
- Ismayanti, I. (n.d.). Efektivitas kebijakan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 di Smpn 2 Sukamulya Kabupaten Tangerang. *Jurnal Papatung*, 4(1), 79–89.
- Syahmina, I. (2020). *Efektivitas Pembelajaran Biologi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2020.
- Yolandasari, M. B. (2020). *Efektivitas Pembelajaran Daring Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas Ii A Mi Unggulan Miftahul Huda Tumang Cepogo Boyolali Tahun Pelajaran 2019/2020*. Institut

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
tentang Sistem Pendidikan Nasional

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 2020 tentang  
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan  
Dalam Masa Darurat Penyebaran  
Covid.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor  
20 Tahun 2020 tentang Pedoman  
Pembatasan Sosial Berskala Besar  
(PSBB) Dalam Penanganan Covid-19  
di Sumatera Barat.

Instruksi Bupati Agam Nomor:  
1528/Disdikbud-Ag/2020 tentang  
Penanganan Dampak Virus Corona Di  
Lingkungan Kabupaten Agam.

Instruksi Bupati Agam Nomor:  
421/2445/Disdikbud/2020 tentang  
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan  
Kegiatan Belajar dan Kegiatan Ibadah  
Ramadhan di Rumah.

Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten  
Agam Nomor:  
421/1539/Disdikbud/2020 tentang  
Pencegahan Covid-19.

### Web Internet

AMCnews. (2020, Juli 21). *Pembelajaran  
Sistem Daring dan Luring untuk  
Tingkat SD Lebih Berat*. Retrieved  
from [amcnews.co.id](https://amcnews.co.id):  
<https://amcnews.co.id/2020/07/21/pem>

Halopadang. (2020, Juli 9). *Pembukaan  
Sekolah di Agam Ditunda, Belajar  
Masih Sistem Daring*. Retrieved from  
[halopadang.id](https://halopadang.id):

<https://halopadang.id/2020/07/09/sekolah-di-agam-ditunda-belajar-masih/2/>

Kemendikbud.go.id. (2020, juli 13). *Data  
Pokok Pendidikan Direktorat Jendral  
Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar dan Pendidikan  
Menengah Pertama Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan  
Teknologi*. Retrieved from

[Kemendikbud.go.id](https://dapo.kemdikbud.go.id/):  
<https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Kemendikbud.go.id. (2021, Januari 9). *Data  
Pokok Pendidikan Direktorat Jendral  
Pendidikan Anak Usia Dini,  
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan  
Menengah Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset dan Teknologi*.  
Retrieved from [Kemendikbud.go.id](https://dapo.kemdikbud.go.id):  
<https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Kemenkeu. (2020, september 7). *Kuota  
untuk pembelajaran daring pelajar  
dan mahasiswa disubsidi pemerintah  
hingga desember 2020*. Retrieved  
from [kementerian keuangan republik  
indonesia](https://www.kemenkeu.go.id):

[https://www.kemenkeu.go.id/publikasi  
/berita/kuota-untuk-pembelajaran-  
daring-pelajar-dan-mahasiswa-  
disubsidi-pemerintah-hingga-  
desember-2020/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/kuota-untuk-pembelajaran-daring-pelajar-dan-mahasiswa-disubsidi-pemerintah-hingga-desember-2020/)

Langgam. (2020, mei 12). *Daftar Sekolah  
Dasar di Kecamatan Lubuk Basung,  
Agam*. Retrieved from [langgam.id](https://langgam.id):  
[https://langgam.id/daftar-sekolah-  
dasar-di-kecamatan-lubuk-basung-  
agam/](https://langgam.id/daftar-sekolah-dasar-di-kecamatan-lubuk-basung-agam/)

Republika. (2020, Juli 28). *Ada Kasus Covid-19, Agam Batal Sekolah Tatap Muka*. Retrieved from republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/qe6e5o377/ada-kasus-covid19-agam-batal-sekolah-tatap-muka>

Topsatu. (2020, April 17). *Pemkab Agam Perpanjang Masa Belajar Siswa di Rumah Hingga 30 April*. Retrieved from topsatu.com: <https://www.topsatu.com/pemkab-agam-perpanjang-masa-belajar-siswa-di-rumah-hingga-30-april/>